



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI

UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NI WAYAN SUCITAWATI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 832057

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

1. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , Rp.
750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 146.000.000

1. MOTOR, HONDA NC12AF2CB1AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HIBAH TANPA
AKTA Rp. 13.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2025, HASIL SENDIRI
Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 16.593.533

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 912.593.533

III. HUTANG Rp. 159.551.103

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 753.042.430

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.